

PERAN GENDER DALAM KETAHANAN PANGANSERTA PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN DI KELOMPOK TANI MUDE HUREDUSUN DOTA DESA LADOGAHARKECAMATAN NITA KABUPATEN SIKKA

Magdalena Selvi Irawati Kwuta¹, Maria Yunita Bhae², Ferdianus Gahu Lewar³,
Mariano Abraham Colson Wangge Tani⁴, Theresia Rensiana Dua Lodan⁵

^{1,2,3,4,5}) Program Studi Agribisnis, Universitas Nusa Nipa

email: selvikwuta@gmail.com¹, bhaee08@gmail.com²,

lewarfedriano@gmail.com³, colsonntani@gmail.com⁴, duatheresia@gmail.com⁵,

Abstrak

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai akses yang stabil kepada makanan yang bergizi dan aman untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan bagi semua orang, setiap saat. Pembuatan kebijakan, di sisi lain, merupakan proses perumusan dan implementasi kebijakan publik untuk mencapai tujuan pembangunan. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota kelompok tani Mude Hure mengenai peran gender dalam ketahanan pangan dan proses pembuatan kebijakan. Tujuan lainnya yaitu anggota kelompok tani mendapatkan informasi tambahan dalam mengelola dan memanfaatkan lokasi pekarangan rumah mereka untuk budidaya tanaman sayuran serta dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli sayur, tetapi sebaliknya dapat menjadi pemasukan untuk mereka sebagai upaya dari pemberdayaan perempuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan cara sosialisasi, pelatihan, dan diskusi kepada anggota kelompok tani. Kegiatan ini dilaksanakan di kelompok tani Mude Hure adalah salah satu kelompok tani yang terletak di Dusun Dota, Desa Ladogahar Kecamatan Nita, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu meningkatnya pemahaman dan kesadaran anggota kelompok tani Mude Hure tentang peran gender dalam ketahanan pangan, dan proses pembuatan kebijakan serta pengaplikasian pemanfaatan perkarangan rumah sebagai pemberdayaan perempuan. Anggota kelompok tani menyambut baik dan antusias selama kegiatan berlangsung.

Kata Kunci: Ketahanan Pangan, Peran Gender, Pembuatan Kebijakan, Kelompok Tani

Abstrack

Food security is defined as stable access to nutritious and safe food to meet the nutritional and health needs of all people, at all times. Policy making, on the other hand, is the process of formulating and implementing public policies to achieve development goals. The aim of this community service activity is to increase understanding and awareness of members of the Mude Hure farmer group regarding the role of gender in food security and the policy making process. Another aim is that members of farmer groups get additional information in managing and utilizing their home gardens for cultivating vegetable crops and can reduce expenses for buying vegetables, but on the other hand it can become an income for them as an effort to empower women. The method used in this community service activity is by means of socialization, training and discussion with members of the farmer group. This activity was carried out in the Mude Hure farmer group, which is one of the farmer groups located in Dota Hamlet, Ladogahar Village, Nita District, Sikka Regency, East Nusa Tenggara. The results of this community service activity are increased understanding and awareness of members of the Mude Hure farmer group regarding the role of gender in food security, and the process of making policies and implementing the use of home gardens as women's empowerment. Farmer group members welcomed and were enthusiastic during the activity.

Keywords: Food Security, Gender Role, Policy Making, Farmer Groups

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan didefinisikan sebagai akses yang stabil kepada makanan yang bergizi dan aman untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan bagi semua orang, setiap saat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembuatan kebijakan, di sisi lain, merupakan proses perumusan dan implementasi kebijakan publik untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu faktor penting dalam mencapai ketahanan pangan adalah peran gender. Konsep gender dipahami sebagai bentukan dari konstruksi sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, konsep gender erat kaitannya dengan proses sosialisasi yang berlangsung secara terus menerus. Menurut Puspitawati (2012) mengartikan kata “gender” sebagai perbedaan peran, status dan tanggung jawab padalaki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan (konstruksi) sosial budaya. Peran gender adalah peran yang dikonstruksikan oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Peran gender dapat memengaruhi akses, kontrol, manfaat, dan partisipasi individu dalam ketahanan pangan dan proses pembuatan kebijakan.

Perspektif gender sangat penting dalam memahami dan mengatasi kompleksitas ketahanan pangan, dan proses pembuatan kebijakan. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem pangan dan mereka juga mengalami berbagai macam hambatan dan peluang yang berbeda. Mengabaikan perspektif gender dalam analisis dan kebijakan dapat memperparah ketidaksetaraan dan menghambat pencapaian ketahanan pangan yang inklusif. Di Indonesia, perempuan umumnya memiliki peran penting dalam ketahanan pangan, mulai dari produksi pangan, pengolahan pangan, penyediaan makanan dan distribusi pangan hingga edukasi gizi. Namun, perempuan sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sumber daya, teknologi, dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan mereka. Hambatan ini termasuk kurangnya akses terhadap lahan, modal, dan kredit, diskriminasi gender dalam pasar dan institusi dan beban kerja yang berat dalam mengurus rumah tangga dan anak. Perubahan iklim dan degradasi lingkungan juga memperparah kerawanan pangan dan memperburuk kesenjangan gender.

Prinsip-prinsip pengarusutamaan gender harus diterapkan dalam pembuatan kebijakan untuk memastikan bahwa kebutuhan, aspirasi, dan pengalaman perempuan dipertimbangkan secara sistematis. Kebijakan yang responsif gender harus berdasarkan pada pemahaman yang kuat tentang peran perempuan dalam sistem pangan dan mata pencaharian. Kebijakan ini harus bertujuan untuk, meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya, teknologi, dan peluang ekonomi, memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan, mengatasi diskriminasi gender.

Perguruan Tinggi berkewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Eniyati & Noor, 2010). Oleh karena itu, salah satu tugas perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang dapat mengasah ilmu dan keterampilan mahasiswa sehingga menjadi agen-agen perubahan dan pembangunan.

Kelompok tani Mude Hure di Dusun Dota Desa Ladogahar, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka, merupakan salah satu kelompok tani yang aktif dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Kelompok tani ini dibentuk sejak tahun 2016 dengan jumlah anggotanya terdiri dari 15 orang. Perempuan di kelompok tani Mude Hure ini memainkan peran penting dalam sistem pangan. Berbagai kegiatan yang dilakukan terkait ketahanan pangan, seperti bertani, berkebun, mengolah hasil panen dan menjaga ketahanan pangan rumah tangga. Hampir semua masyarakat yang ada di Dusun Dota yaitu yang tergabung dalam kelompok tani Mude Hure memiliki lahan pekarangan yang sangat luas tetapi tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk meningkatkan perekonomian atau pendapatan masyarakat anggota kelompok tani Mude Hure di Dusun Dota dapat dilakukan dengan optimalisasi pemanfaatan pekarangan rumah meningkatkan ketahanan pangan bidang pertanian melalui budidaya tanaman sayur-sayuran dengan mengolah lahan pekarangan menjadi produktif. Optimalisasi memanfaatkan pekarangan rumah dilakukan untuk peningkatan fungsi lahan dan budidaya tanaman sayuran organik (Sasongko & Salamah, 2019). Hasil pengabdian masyarakat Made dan Madinawati (2020), memberdayakan pekarangan dengan menanam sayur-sayuran dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Dengan melakukan budidaya tanaman sayuran di lahan pekarangan akan membantu masyarakat dalam menyediakan pangan yang sehat dan bergizi serta mendukung ketahanan pangan. Selain bertani anggota perempuan di kelompok tani Mude Hure Dusun Dota juga bekerja di sektor lain seperti menenun, berdagang dan menjadi buruh harian. Pemerintah Desa Ladogahar telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait ketahanan pangan seperti program bantuan modal untuk

petani, pelatihan keterampilan untuk perempuan, dan pembangunan infrastruktur desa. Namun, masih terdapat kesenjangan peran gender dalam ketahanan pangan dan proses pembuatan kebijakan di kelompok tani tersebut. Perempuan masih sering dipinggirkan dalam pengambilan keputusan dan tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan informasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyuluhan: sosialisasi program, diskusi bersama, serta pelatihan sehingga anggota kelompok tani Mude Huredi Dusun Dota memahami perspektif gender berkaitan dengan peran gender dalam ketahanan pangan, serta proses pembuatan kebijakan. Pemberdayaan perempuan dalam kelompok tani sehingga bisa lebih mandiri dan inovatif, kreatif dalam mengelola dan memanfaatkan lokasi pekarangan rumah mereka untuk budidaya tanaman sayuran serta dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli sayur, tetapi sebaliknya dapat menjadi pemasukan untuk mereka.

METODE

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota kelompok tani mengenai peran gender dalam ketahanan pangan, serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan. Tujuan lainnya yaitu anggota kelompok tani mendapatkan informasi tambahan dalam mengelola dan memanfaatkan lokasi pekarangan rumah mereka untuk budidaya tanaman sayuran serta dapat mengurangi pengeluaran untuk membeli sayur, tetapi sebaliknya dapat menjadi pemasukan untuk mereka sebagai upaya dari pemberdayaan perempuan dan memperkuat kelembagaan kelompok tani Mude Hure dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi, pelatihan, dan diskusi. Sosialisasi digunakan untuk menyampaikan materi tentang peran gender dalam ketahanan pangan dan proses pembuatan kebijakan. Diskusi digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami saat penjelasan materi tersebut dan menggali pemahaman dan pengalaman anggota kelompok tani tentang peran gender dalam ketahanan pangan dan proses pembuatan kebijakan di kelompok tani mereka. Pelatihan bertujuan untuk melatih anggota kelompok tani dalam menerapkan peran gender dalam ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Sosialisasi dilakukan di Kelompok Tani Mude Hure Dusun Dota Desa Ladogahar, Kecamatan Nita Kabupaten Sikka pada tanggal 24 Mei 2024. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini berjumlah 15 orang. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Tahapan identifikasi masalah
 - a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan peran gender dalam ketahanan pangan, serta proses pembuatan kebijakan.
2. Tahapan dalam membangun kesadaran gender di tengah masyarakat
 - a. Sosialisasi program disampaikan oleh mahasiswa-mahasiswi yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman terkait dengan konsep gender melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk penyampaian teknis kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, dan tim yang ikut terlibat. Hal ini penting dilakukan agar masyarakat memahami gender bukan hanya tentang laki-laki dan perempuan, tetapi juga tentang peran, tanggung jawab, hak, dan akses yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
 - b. Penyampaian materi sosialisasi, peserta yang ikut dalam kegiatan pengabdian akan diberikan materi tentang Peran Gender dalam Ketahanan Pangan, serta Gender dalam Proses Pembuatan Kebijakan sebagai upaya untuk membangun pemahaman kesetaraan gender dalam lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kegiatan yaitu: (1) Sosialisasi mengenai peran gender dan ketahanan pangan, (2) sosialisasi mengenai peran gender dalam proses pembuatan kebijakan.

1. Sosialisasi Mengenai Peran Gender Dan Ketahanan Pangan

Gender mengacu pada seperangkat sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak dan perilaku yang melekat pada diri perempuan dan laki-laki sebagai akibat benturan budaya lingkungan masyarakat. Sehingga muncul dikotomi feminisme (perempuan) dan maskulin (laki-laki). Di masyarakat

perempuan digambarkan dengan sifat feminimnya, seperti lemah, pemalu, penakut, emosional. Sebaliknya laki-laki selalu digambarkan dengan sifat maskulinnya seperti, gagah, perkasa, tegar, berani, rasional, dan kokoh. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia (Aprinelita, 2021). Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat (Pambudi, 2021). Ketahanan pangan adalah kondisi dimana setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi yang memadai terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan preferensi makanan mereka setiap saat. Ketahanan pangan menurut UU No. 18/2012 tentang pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan dalam rumah tangga menurut FAO (1992) didefinisikan sebagai kecukupan pangan secara kuantitas dan kualitas dengan akses berkelanjutan untuk memastikan kehidupan yang sehat semua anggota dalam rumah tangga. Menurut Ericksen et al. (2009), ketahanan pangan tidak dapat dilihat dari satu faktor saja, melainkan keseluruhan faktor produksi, seperti penyimpanan, pemrosesan dan distribusi makanan. Pembangunan ketahanan pangan adalah mencapai ketahanan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap individu atau rumah tangga dari produksi pangan nasional, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, jumlah dan mutu, aman, merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia (Suharyanto, 2011). Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju (Purwaningsih, 2008).

Ketahanan pangan dan kesetaraan gender merupakan dua isu penting yang saling terkait erat. Perempuan memainkan peran krusial dalam memastikan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dan komunitas. Namun, mereka seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses sumber daya, informasi, dan teknologi yang diperlukan untuk mencapai potensi penuh mereka. Keterlibatan perempuan dalam produksi dan distribusi pangan akan berdampak pada pemenuhan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, serta keamanan dan ketahanan pangan.

Pemanfaatan pekarangan rumah dapat menjadi peluang bagi perempuan untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan meningkatkan pendapatan keluarga. Perempuan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang unik tentang tanaman dan hewan, serta pengalaman dalam mengelola pekarangan rumah. Perempuan juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa makanan yang diproduksi dari pekarangan rumah aman dan bergizi.

Perempuan di kelompok tani Mude Hure memiliki peran penting dalam ketahanan pangan. Mereka terlibat dalam berbagai kegiatan pertanian, seperti menanam, memanen, dan mengolah hasil panen. Perempuan juga bertanggung jawab atas pengolahan pangan, penyimpanan pangan, dan distribusi pangan di tingkat rumah tangga.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Gender dan Ketahanan Pangan



Gambar 2. Pemanfaatan Pekarangan Rumah dengan Penanaman Sayur Dalam Polybag

2. Sosialisasi Mengenai Peran Gender Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Menurut Carl Friedrich, Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Kebijakan yang dilakukan guna menghapuskan ketidakadilan gender adalah dengan melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses pembuatan kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam proses pembuatan kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan dapat adil dan berpihak pada semua pihak, termasuk perempuan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pembuat kebijakan tentang pentingnya kesetaraan gender, dan dengan membangun kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada semua pihak, termasuk perempuan.



Gambar 3. Kegiatan Sosialisasi Gender dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Hasil Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran anggota kelompok tani Mude Hure tentang peran gender dalam ketahanan pangan dan proses pembuatan kebijakan meningkat. Anggota kelompok tani menjadi lebih memahami bahwa perempuan memiliki peran penting dalam ketahanan pangan dan perempuan harus dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatan kebijakan.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan, bahwa kesimpulan yang dapat diperoleh dari kegiatan pengabdian ini yaitu anggota kelompok tani mendapatkan pemahaman dimana dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan secara menyeluruh, diperlukan langkah-langkah konkret

untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam akses terhadap sumber daya, meningkatkan peran perempuan dalam sektor pertanian, dan memperkuat partisipasi mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Pemanfaatan pekarangan rumah dengan tujuan meningkatkan ketahanan pangan dengan menanam sayuran dalam pot yang dilakukan oleh perempuan anggota kelompok tani Mude Hure juga sebagai suatu proses pemberdayaan bagi kaum perempuan.

Pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa pentingnya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang peran gender dalam ketahanan pangan dan proses pembuatan kebijakan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran, perempuan dapat lebih berperan aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berkeadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprinelita, A. (2021). Perlindungan Hukum Konsumen Dari Prodk Pangan Kedaluarsa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen . KODIFIKASI, 3 (2), 24-36.
- Anonim, 2012. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan. Kantor Menteri Negara Pangan RI.
- Ericksen PJ, Ingram JSI, Liverman DM. 2009. Food Security and Global Environmental Change: Emerging Challenges. Environmental Science and Policy. vol 12(2009): 373 –377. [diakses 2024 Juni 12]. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2009.04.007>
- Eniyati, S., & Noor, C. (2010). Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Penilaian Prestasi Dosen Berdasarkan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, XV (2), 136-142.
- [FAO] Food and Agriculture Organization. 1992. [The State of Food and Agriculture [diakses 2024 Juni 12]. <http://www.fao.org/3/a-t0656e.pdf>.
- <https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan>
- <http://ejournal.skpm.ipb.ac.id/index.php/jskpm/article/view/858/409> Analisis Gender pada Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Agroforestri (diakses 2024 Juni 16).
- Made, U., & Madinawati. (2020). Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui optimalisasi lahan pekarangan dengan budidaya sayuran organik untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. Abditani: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 14-19. Retrieved <http://abditani.jurnalpertanianunisapalu.com/index.php/abditani/articel/view/8/29>
- Sasongko, H, & Salamah, Z. (2019). Optimalisasi Lahan Pekarangan Rumah Dengan Budidaya Tanaman Sayuran Organik Di Dusun Krajan Desa Somongari Kec. Kaligesing Kab. Purwerjo Hadi. Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, (14 September 2019), 1-8.
- Puspitawati H. 2012. Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Pambudi, A. R. (2008). Kewajiban Pemenuhan Ketersediaan Jagung Untuk Penjaminan Ketahanan Pangan Nasional. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 49-54.
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan Pangan.: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan. 9(1), 1-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jep.v9i1.1028>.
- https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html
- Veny Triyana, & Marimbun. (2021). Meningkatkan ketahanan pangan bidang pertanian melalui budidaya tanaman sayur sayuran di Desa Sidodadi Kec. Langsa Lama. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 1 (Jan-Jun 2021), 1-6.